



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 588 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN TATA NASKAH DINAS  
UNTUK BADAN PENYELENGGARA ADHOC

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan ketatausahaan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024, perlu ditetapkan pedoman teknis kode klasifikasi arsip dan tata naskah dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pedoman Teknis Kode Klasifikasi Arsip dan Tata Naskah Dinas untuk Badan Penyelenggara Adhoc Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 400 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 145/PK.01-BA/5310/2024 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 27 Mei 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN TATA NASKAH DINAS UNTUK BADAN PENYELENGGARA ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kode Klasifikasi Arsip dan Tata Naskah Dinas Untuk Badan Penyelenggara Adhoc Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi Badan Penyelenggara Adhoc dalam menjalankan penyelenggaraan fungsi administrasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 588 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KODE  
KLASIFIKASI ARSIP DAN TATA NASKAH  
DINAS UNTUK BADAN PENYELENGGARA  
ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
MANGGARAI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN TATA NASKAH DINAS UNTUK  
BADAN PENYELENGGARA ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2024

A. Kode Klasifikasi Arsip

1. Pengkodean Persiapan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

PP.02.2	Penataan Organisasi
PP.04.2	Pembentukan Badan Penyelenggara
PP.05.2	Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi di Setiap Tingkatan
PP.06.2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih
PP.07.2	Pengelolaan Data dan Informasi
PP.09	Logistik Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
PP.09.1	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilihan
PP.09.3	Administrasi dan Alokasi Sarana Dan Prasarana Pemilihan
PP.09.4	Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilihan (Angkutan Reguler/Non Reguler)
PP.09.5	Penyimpanan Sarana Pemilihan

2. Pengkodean Pelaksanaan, selanjutnya dijabarkan pada table berikut:

PL.02	Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
PL.02.1	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
PL.02.4	Kampanye
PL.02.6	Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

3. Pengkodean Penyelesaian, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

PY.02	Penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
PY.02.2	Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan

PK.01	Persidangan Meliputi Rapat Pleno, Risalah Rapat Pleno, Berita Acara Rapat, Transkrip Rekaman Rapat, Rekaman Hasil Rapat (Audio)	
PK.02	Keprotokolan	
	PK.02.1	Upacara/Acara Kedinasan
		Naskah Dinas yang berkaitan Dengan pelantikan

6. Pengkodean Naskah Dinas Keuangan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

KU.03	Pelaksanaan Anggaran	
	KU.03.2	Belanja meliputi naskah-naskah: a) Pembukuan Anggaran, mencakup: (1) Buku Kas Umum (BKU); (2) Buku Kas Pembantu (BKP); (3) Rekening Koran; b) Laporan Pertanggungjawaban; c) Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Tahunan, mencakup: (4) Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Tahunan

#### B. Kode Naskah Dinas

Kode Naskah Dinas merupakan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Klasifikasi Naskah Dinas, yang digabungkan dengan tanda hubung (-). Kode Klasifikasi Naskah berdasarkan jenis Naskah Dinasnya adalah sebagai berikut:

KODE NASKAH DINAS	
JENIS NASKAH DINAS	KODE
Surat Tugas	ST
Surat Dinas	SD
Surat Undangan	Und
Berita Acara	BA
Surat Pengantar	SR
Laporan	LP
Notula	NT
Pengumuman	PU

#### C. Kode Wilayah

Kode Wilayah merupakan kode yang menunjukkan kode PPK dan PPS pembuat Naskah Dinas. Kode Wilayah ini digunakan bagi seluruh PPK dan PPS. Kode Wilayah, selanjutnya dijabarkan dalam tabel

**KODE WILAYAH DESA/KELURAHAN KABUPATEN MANGGARAI**

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kode Kelurahan/Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten</b>
53.10.01			WAE RII	
1	<b>Bangka Jong (Bangkajong)</b>	53.10.01.2010	Wae Rii	Manggarai
2	<b>Bangka Kenda</b>	53.10.01.2012	Wae Rii	Manggarai
3	<b>Benteng Poco</b>	53.10.01.2018	Wae Rii	Manggarai
4	<b>Compang Ndehes</b>	53.10.01.2009	Wae Rii	Manggarai
5	<b>Golo Cador</b>	53.10.01.2006	Wae Rii	Manggarai
6	<b>Golo Mendo</b>	53.10.01.2013	Wae Rii	Manggarai
7	<b>Golo Watu/Wutu</b>	53.10.01.2017	Wae Rii	Manggarai
8	<b>Golo Wua (Golo Wuas)</b>	53.10.01.2014	Wae Rii	Manggarai
9	<b>Lalong</b>	53.10.01.2002	Wae Rii	Manggarai
10	<b>Longko</b>	53.10.01.2007	Wae Rii	Manggarai
11	<b>Ndehes</b>	53.10.01.2005	Wae Rii	Manggarai
12	<b>Poco</b>	53.10.01.2003	Wae Rii	Manggarai
13	<b>Ranaka/Renaka</b>	53.10.01.2016	Wae Rii	Manggarai
14	<b>Ranggi</b>	53.10.01.2008	Wae Rii	Manggarai
15	<b>Satar Ngkeling</b>	53.10.01.2001	Wae Rii	Manggarai
16	<b>Wae Mulu</b>	53.10.01.2004	Wae Rii	Manggarai
17	<b>Wae Rii</b>	53.10.01.2015	Wae Rii	Manggarai
53.10.18			SATAR MESE UTARA	
18	<b>Cireng</b>	53.10.18.2009	Satar Mese Utara	Manggarai
19	<b>Gulung</b>	53.10.18.2003	Satar Mese Utara	Manggarai
20	<b>Kole</b>	53.10.18.2006	Satar Mese Utara	Manggarai
21	<b>Lia</b>	53.10.18.2005	Satar Mese Utara	Manggarai
22	<b>Ling</b>	53.10.18.2007	Satar Mese Utara	Manggarai
23	<b>Mata Wae</b>	53.10.18.2011	Satar Mese Utara	Manggarai
24	<b>Nao</b>	53.10.18.2008	Satar Mese Utara	Manggarai
25	<b>Popo</b>	53.10.18.2004	Satar Mese Utara	Manggarai
26	<b>Renda</b>	53.10.18.2001	Satar Mese Utara	Manggarai
27	<b>Ruang</b>	53.10.18.2010	Satar Mese Utara	Manggarai
28	<b>Todo</b>	53.10.18.2002	Satar Mese Utara	Manggarai
53.10.13			SATAR MESE BARAT	
29	<b>Bea Kondo</b>	53.10.13.2005	Satar Mese Barat	Manggarai
30	<b>Borik</b>	53.10.13.2019	Satar Mese Barat	Manggarai
31	<b>Cambir Leca</b>	53.10.13.2021	Satar Mese Barat	Manggarai
32	<b>Ceka Luju</b>	53.10.13.2014	Satar Mese Barat	Manggarai
33	<b>Golo Ropong</b>	53.10.13.2012	Satar Mese Barat	Manggarai

37	<b>Satar Luju</b>	53.10.13.2015	Satar Mese Barat	Manggarai
38	<b>Satar Ruwuk</b>	53.10.13.2017	Satar Mese Barat	Manggarai
39	<b>Terong</b>	53.10.13.2013	Satar Mese Barat	Manggarai
40	<b>Wongka</b>	53.10.13.2022	Satar Mese Barat	Manggarai
53.10.05			SATAR MESE	
41	<b>Gara</b>	53.10.05.2035	Satar Mese	Manggarai
42	<b>Golo Lambo</b>	53.10.05.2031	Satar Mese	Manggarai
43	<b>Golo Muntas</b>	53.10.05.2036	Satar Mese	Manggarai
44	<b>Iteng</b>	53.10.05.2039	Satar Mese	Manggarai
45	<b>Jaong</b>	53.10.05.2003	Satar Mese	Manggarai
46	<b>Koak</b>	53.10.05.2022	Satar Mese	Manggarai
47	<b>Langgo</b>	53.10.05.2023	Satar Mese	Manggarai
48	<b>Legu</b>	53.10.05.2024	Satar Mese	Manggarai
49	<b>Lolang</b>	53.10.05.2041	Satar Mese	Manggarai
50	<b>Lungar</b>	53.10.05.2020	Satar Mese	Manggarai
51	<b>Mocok</b>	53.10.05.2021	Satar Mese	Manggarai
52	<b>Ngkaer</b>	53.10.05.2032	Satar Mese	Manggarai
53	<b>Paka</b>	53.10.05.2025	Satar Mese	Manggarai
54	<b>Papang</b>	53.10.05.2018	Satar Mese	Manggarai
55	<b>Ponggeok</b>	53.10.05.2038	Satar Mese	Manggarai
56	<b>Pongkor</b>	53.10.05.2004	Satar Mese	Manggarai
57	<b>Satar Loung</b>	53.10.05.2040	Satar Mese	Manggarai
58	<b>Tado</b>	53.10.05.2034	Satar Mese	Manggarai
59	<b>Tal</b>	53.10.05.2028	Satar Mese	Manggarai
60	<b>Ulu Belang</b>	53.10.05.2042	Satar Mese	Manggarai
61	<b>Umung</b>	53.10.05.2033	Satar Mese	Manggarai
62	<b>Wae Ajang</b>	53.10.05.2005	Satar Mese	Manggarai
63	<b>Wewo</b>	53.10.05.2019	Satar Mese	Manggarai
53.10.03			RUTENG	
64	<b>Bangka Lao</b>	53.10.03.2029	Ruteng	Manggarai
65	<b>Bea Kakor (Beokakor)</b>	53.10.03.2031	Ruteng	Manggarai
66	<b>Belang Turi</b>	53.10.03.2022	Ruteng	Manggarai
67	<b>Benteng Kuwu</b>	53.10.03.2021	Ruteng	Manggarai
68	<b>Beo Rahong</b>	53.10.03.2011	Ruteng	Manggarai
69	<b>Bulan</b>	53.10.03.2006	Ruteng	Manggarai
70	<b>Compang Dalo</b>	53.10.03.2030	Ruteng	Manggarai
71	<b>Compang Namut</b>	53.10.03.2032	Ruteng	Manggarai
72	<b>Cumbi</b>	53.10.03.2002	Ruteng	Manggarai
73	<b>Golo Worok</b>	53.10.03.2019	Ruteng	Manggarai
74	<b>Kakor</b>	53.10.03.2003	Ruteng	Manggarai
75	<b>Meler</b>	53.10.03.2020	Ruteng	Manggarai
76	<b>Poco Likang (Poco Liking)</b>	53.10.03.2025	Ruteng	Manggarai
77	<b>Pong Lale</b>	<a href="https://doi.org/10.30605/manggarai">https://doi.org/10.30605/manggarai</a>	Ruteng	Manggarai
78	<b>Pong Loo</b>	53.10.03.2010	Ruteng	Manggarai

82	<b>Wae Belang</b>	53.10.03.1005	Ruteng	Manggarai
53.10.16			REOK BARAT	
83	<b>Kajong (Wae Kajong)</b>	53.10.16.2001	Reok Barat	Manggarai
84	<b>Lante</b>	53.10.16.2002	Reok Barat	Manggarai
85	<b>Lemarang</b>	53.10.16.2007	Reok Barat	Manggarai
86	<b>Loce</b>	53.10.16.2006	Reok Barat	Manggarai
87	<b>Nggalak</b>	53.10.16.2005	Reok Barat	Manggarai
88	<b>Para Lando</b>	53.10.16.2009	Reok Barat	Manggarai
89	<b>Rura</b>	53.10.16.2010	Reok Barat	Manggarai
90	<b>Sambi</b>	53.10.16.2004	Reok Barat	Manggarai
91	<b>Toe</b>	53.10.16.2003	Reok Barat	Manggarai
92	<b>Torong Koe</b>	53.10.16.2008	Reok Barat	Manggarai
53.10.11			REOK	
93	<b>Bajak</b>	53.10.11.2010	Reok	Manggarai
94	<b>Baru</b>	53.10.11.1019	Reok	Manggarai
95	<b>Mata Air</b>	53.10.11.1018	Reok	Manggarai
96	<b>Reo</b>	53.10.11.1017	Reok	Manggarai
97	<b>Robek</b>	53.10.11.2001	Reok	Manggarai
98	<b>Ruis</b>	53.10.11.2009	Reok	Manggarai
99	<b>Salama</b>	53.10.11.2012	Reok	Manggarai
100	<b>Wangkung</b>	53.10.11.1020	Reok	Manggarai
101	<b>Watu Baur</b>	53.10.11.2011	Reok	Manggarai
102	<b>Watu Tango</b>	53.10.11.2016	Reok	Manggarai
53.10.14			RAHONG UTARA	
103	<b>Bangka Ajang</b>	53.10.14.2005	Rahong Utara	Manggarai
104	<b>Bangka Ruang</b>	53.10.14.2011	Rahong Utara	Manggarai
105	<b>Benteng Tubi</b>	53.10.14.2002	Rahong Utara	Manggarai
106	<b>Buar</b>	53.10.14.2001	Rahong Utara	Manggarai
107	<b>Compang Dari</b>	53.10.14.2003	Rahong Utara	Manggarai
108	<b>Dimpong</b>	53.10.14.2004	Rahong Utara	Manggarai
109	<b>Golo Langkok</b>	53.10.14.2008	Rahong Utara	Manggarai
110	<b>Liang Bua</b>	53.10.14.2006	Rahong Utara	Manggarai
111	<b>Manong</b>	53.10.14.2010	Rahong Utara	Manggarai
112	<b>Pong Lengor</b>	53.10.14.2009	Rahong Utara	Manggarai
113	<b>Tengku Lese</b>	53.10.14.2007	Rahong Utara	Manggarai
114	<b>Wae Mantang</b>	53.10.14.2012	Rahong Utara	Manggarai
53.10.15			LELAK	
115	<b>Bangka Dese</b>	53.10.15.2006	Lelak	Manggarai
116	<b>Bangka Lelak</b>	53.10.15.2001	Lelak	Manggarai
117	<b>Bangka Tonggur</b>	53.10.15.2009	Lelak	Manggarai
118	<b>Gelong</b>	53.10.15.2002	Lelak	Manggarai
119	<b>Ketang</b>	53.10.15.2004	Lelak	Manggarai
120	<b>Lentang</b>	53.10.15.2010	Lelak	Manggarai
121	<b>Nati</b>	53.10.15.2007	Lelak	Manggarai

53.10.12			LANGKE REMBONG	
125	<b>Bangka Leda</b>	53.10.12.1019	Langke Rembong	Manggarai
126	<b>Bangka Nekang</b>	53.10.12.1012	Langke Rembong	Manggarai
127	<b>Carep</b>	53.10.12.1011	Langke Rembong	Manggarai
128	<b>Compang Carep</b>	53.10.12.1015	Langke Rembong	Manggarai
129	<b>Compang Tuke</b>	53.10.12.1020	Langke Rembong	Manggarai
130	<b>Golo Dukal</b>	53.10.12.1001	Langke Rembong	Manggarai
131	<b>Karot</b>	53.10.12.1003	Langke Rembong	Manggarai
132	<b>Laci Carep</b>	53.10.12.1016	Langke Rembong	Manggarai
133	<b>Lawir</b>	53.10.12.1005	Langke Rembong	Manggarai
134	<b>Mbaumuku</b>	53.10.12.1009	Langke Rembong	Manggarai
135	<b>Pau</b>	53.10.12.1006	Langke Rembong	Manggarai
136	<b>Pitak</b>	53.10.12.1004	Langke Rembong	Manggarai
137	<b>Poco Mal</b>	53.10.12.1014	Langke Rembong	Manggarai
138	<b>Rowang</b>	53.10.12.1018	Langke Rembong	Manggarai
139	<b>Satar Tacik</b>	53.10.12.1013	Langke Rembong	Manggarai
140	<b>Tadong</b>	53.10.12.1017	Langke Rembong	Manggarai
141	<b>Tenda</b>	53.10.12.1010	Langke Rembong	Manggarai
142	<b>Wali</b>	53.10.12.1002	Langke Rembong	Manggarai
143	<b>Waso</b>	53.10.12.1007	Langke Rembong	Manggarai
144	<b>Watu</b>	53.10.12.1008	Langke Rembong	Manggarai
53.10.17			CIBAL BARAT	
145	<b>Bangka Ara</b>	53.10.17.2008	Cibal Barat	Manggarai
146	<b>Bere</b>	53.10.17.2001	Cibal Barat	Manggarai
147	<b>Compang Cibal</b>	53.10.17.2009	Cibal Barat	Manggarai
148	<b>Golo Lanak</b>	53.10.17.2004	Cibal Barat	Manggarai
149	<b>Golo Woi</b>	53.10.17.2003	Cibal Barat	Manggarai
150	<b>Latung</b>	53.10.17.2005	Cibal Barat	Manggarai
151	<b>Lenda</b>	53.10.17.2010	Cibal Barat	Manggarai
152	<b>Timbu</b>	53.10.17.2007	Cibal Barat	Manggarai
153	<b>Wae Codi</b>	53.10.17.2002	Cibal Barat	Manggarai
154	<b>Wae Renca</b>	53.10.17.2006	Cibal Barat	Manggarai
53.10.06			CIBAL	
155	<b>Barang</b>	53.10.06.2009	Cibal	Manggarai
156	<b>Bea Mese</b>	53.10.06.2011	Cibal	Manggarai
157	<b>Gapong</b>	53.10.06.2025	Cibal	Manggarai
158	<b>Golo</b>	53.10.06.2008	Cibal	Manggarai
159	<b>Golo Ncuang</b>	53.10.06.2027	Cibal	Manggarai
160	<b>Kentol</b>	53.10.06.2014	Cibal	Manggarai
161	<b>Ladur</b>	53.10.06.2013	Cibal	Manggarai
162	<b>Lando</b>	53.10.06.2024	Cibal	Manggarai
163	<b>Langkas</b>	53.10.06.2012	Cibal	Manggarai
164	<b>Nenu</b>	53.10.06.2001	Cibal	Manggarai
165	<b>Pagal</b>	53.10.06.1020	Cibal	Manggarai
166	<b>Pangk</b>	53.10.06.2010	Cibal	Manggarai

170	<b>Welu</b>	53.10.06.2007	Cibal	Manggarai
171	<b>Wudi</b>	53.10.06.2006	Cibal	Manggarai

#### D. Petunjuk Penyusunan Dan Penomoran Naskah

Penomoran Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis Naskah Dinas sebagaimana diklasifikasikan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas

- a) Nomor Pembukuan : Nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam satu tahun yang ditulis dengan angka Arab dan angka Tunggal untuk nomor dibawah angka 10 contoh 1,2,3,4 dst.
- b) Kode Klasifikasi : Kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas.
- c) Kode Wilayah : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan PPK atau PPS pembuat Naskah Dinas.
- d) Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas

##### 2. Penomoran Naskah Dinas

Sistem penomoran dan kode Naskah Dinas korespondensi internal pada Sekretariat Jenderal KPU ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: Nomor/Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah dinas/Kode wilayah/Tahun

#### E. Petunjuk Penyusunan Dan Simulasi Penomoran Naskah

Penomoran Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis Naskah Dinas sebagaimana diklasifikasikan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

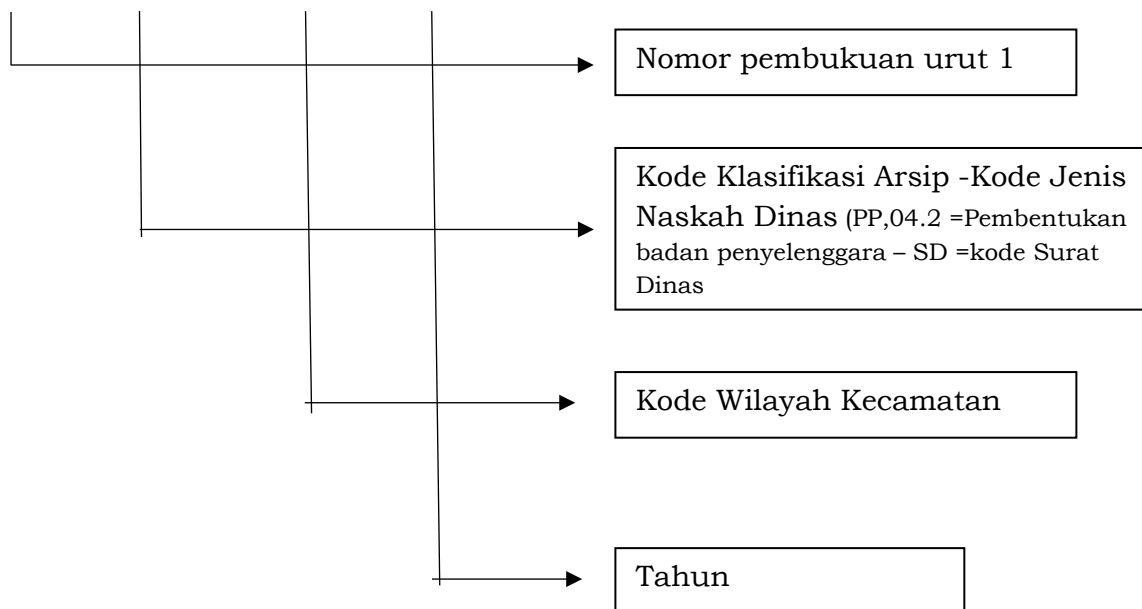
- a) Nomor Pembukuan : Nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam satu tahun yang ditulis dengan angka Arab dan angka Tunggal untuk nomor dibawah angka 10 contoh 1,2,3,4 dst
- b) Kode Klasifikasi : Kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas.
- c) Kode Wilayah : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan PPK atau PPS pembuat Naskah Dinas.
- f) Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas

Melalui sistem penomoran sebagaimana dijelaskan di atas, maka sebagai gambaran umum penomoran Naskah Dinas dapat disimulasikan sebagai berikut:

## 1. Surat Dinas

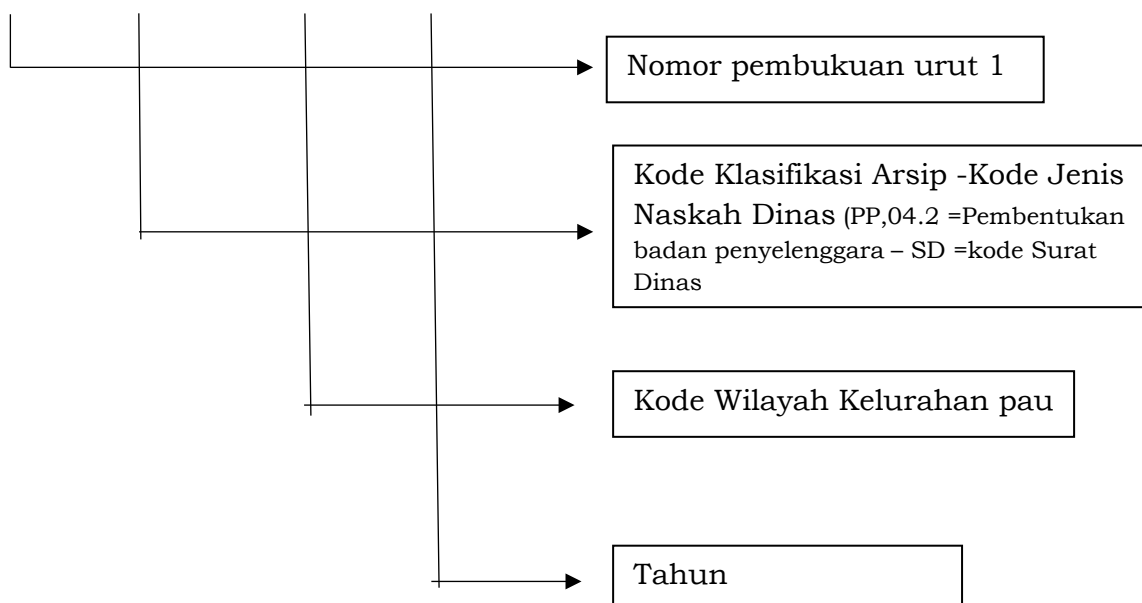
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPK Langke Rembong :

1/ PP.04.2-SD/53.10.12/2024



Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPS Pau :

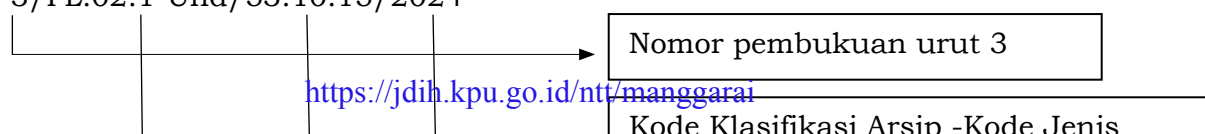
1/ PP.04.2-SD/53.10.12.1006/2024



## 2. Surat Undangan

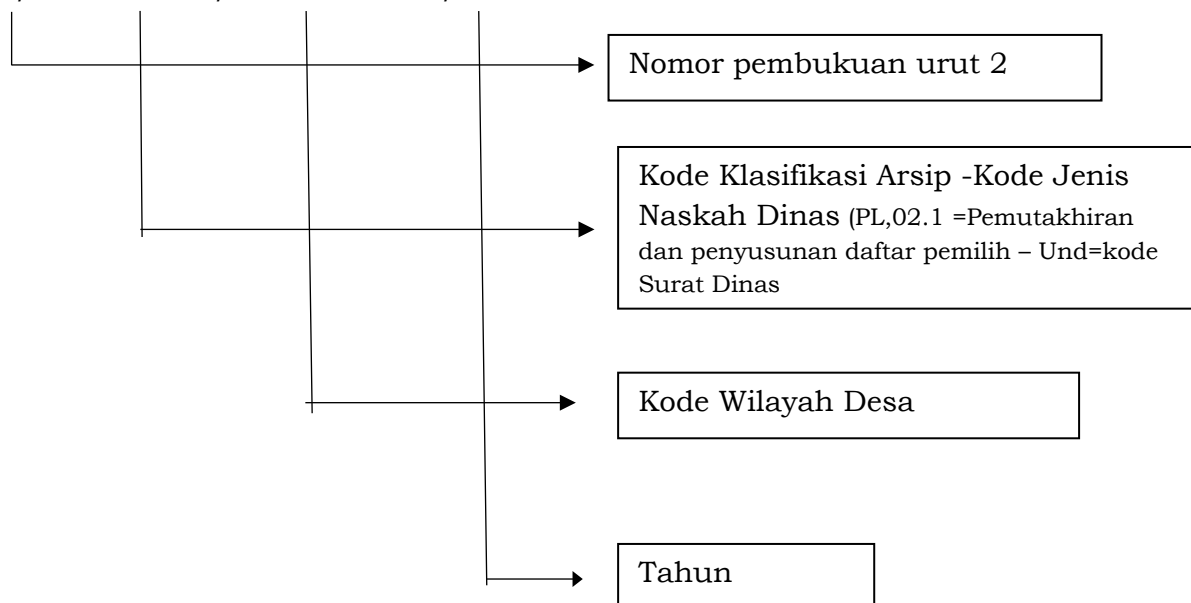
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPK Lelak :

3/PL.02.1-Und/53.10.15/2024



Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPS Ndiwar :

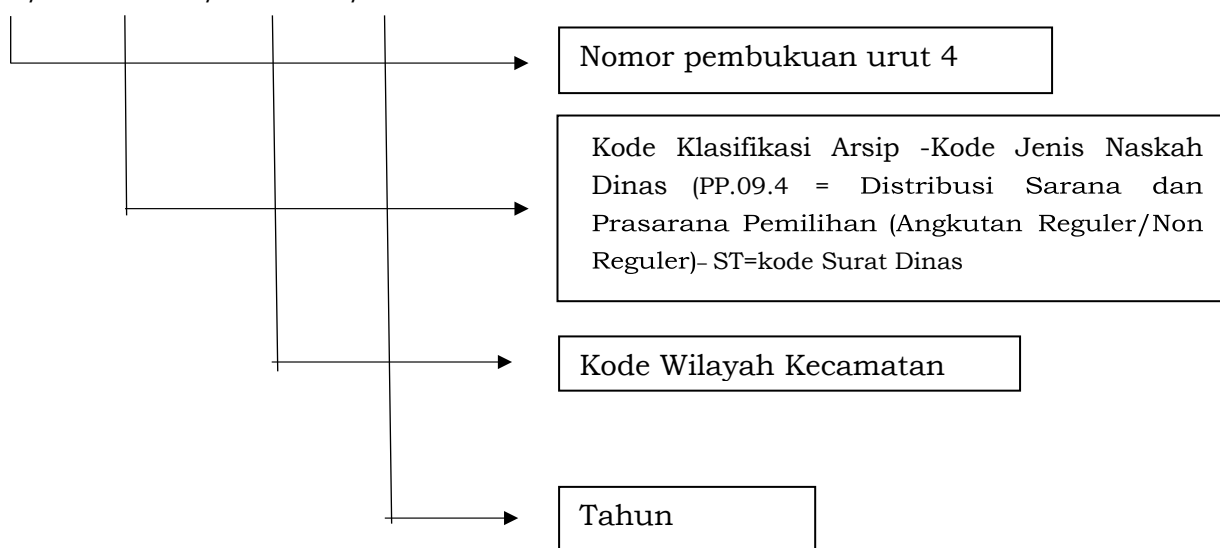
2/PL.02.1-Und/53.10.15.2008/2024



Surat Tugas

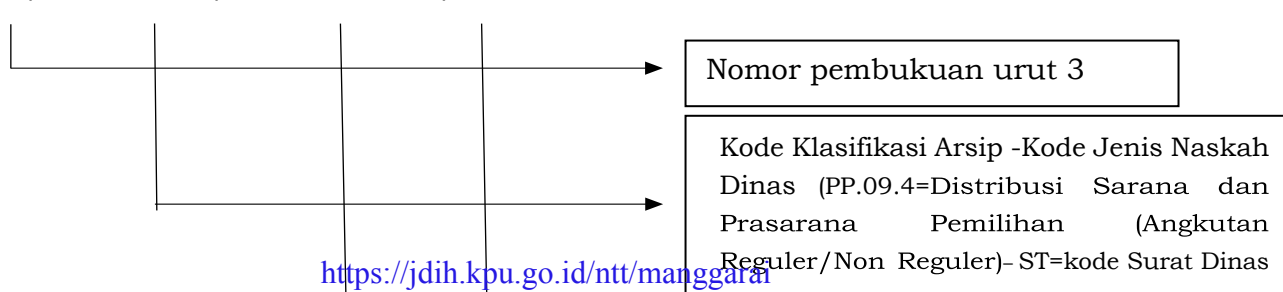
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPK Reok :

4/PP.09.4-ST/53.10.11/2024



Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretaris PPS Kelurahan Mata Air:

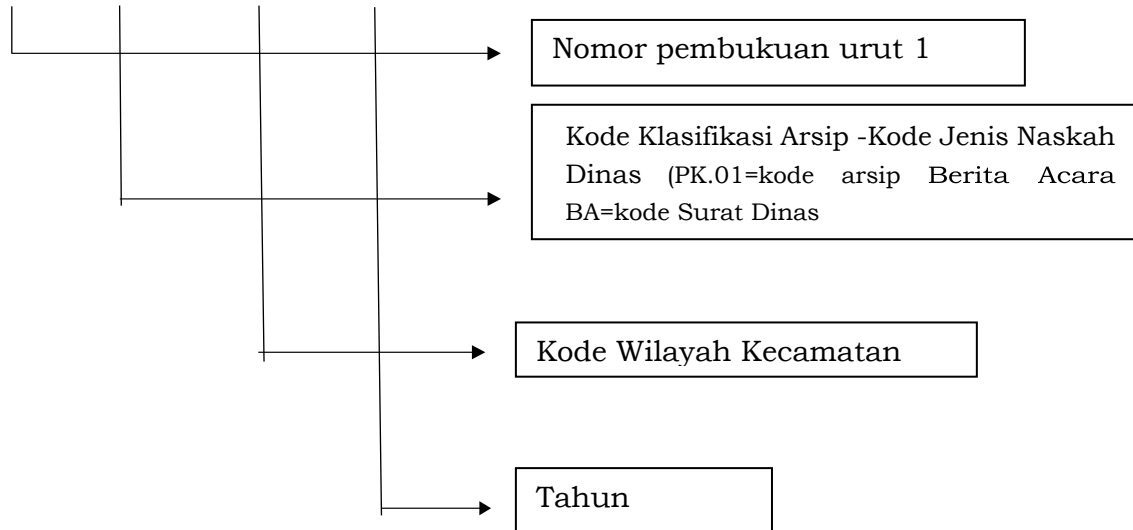
3/ PP.09.4-ST/53.10.11.1018/2024



### 3. Berita Acara

Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Anggota PPK serta Sekretariat Wae Rii :

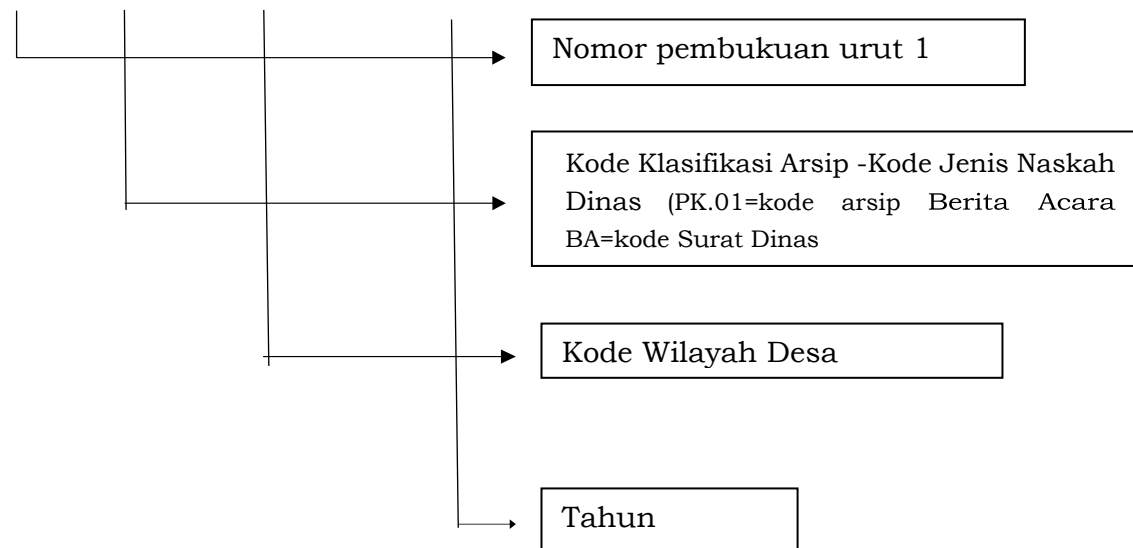
1/PK.01-BA/ 53.10.01/2024



Kl berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan silahkan gunakan kode sesuai tahapan contoh: kalau dalam tahapan pemutakhiran data pilih gunakan kode surat: 1/PL.02.1-BA/5310...../2024.

Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Anggota PPS serta Sekretariat PPS Golo Cador :

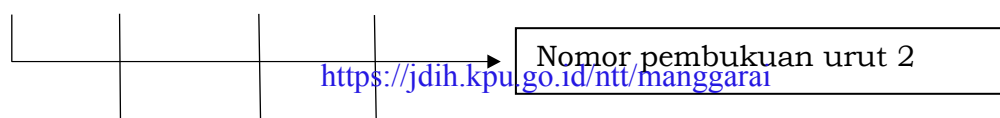
1/PK.01-BA/ 53.10.01.2006/2024



### 4. Surat Pengantar

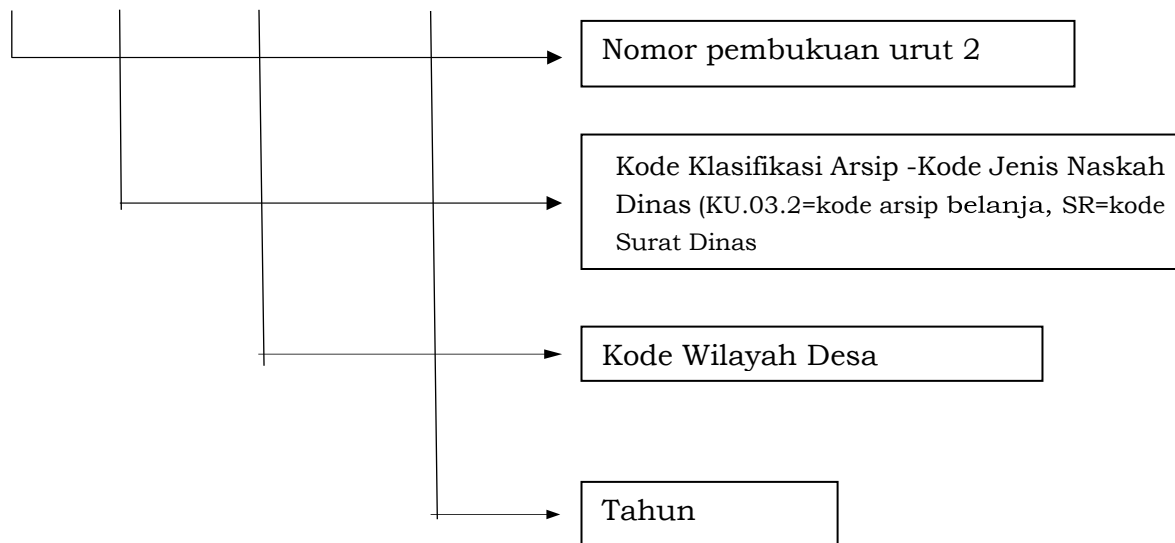
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Sekretaris PPK Ruteng:

2/KU.03.2-SR/53.10.03/2024



Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Sekretaris PPS Bulan:

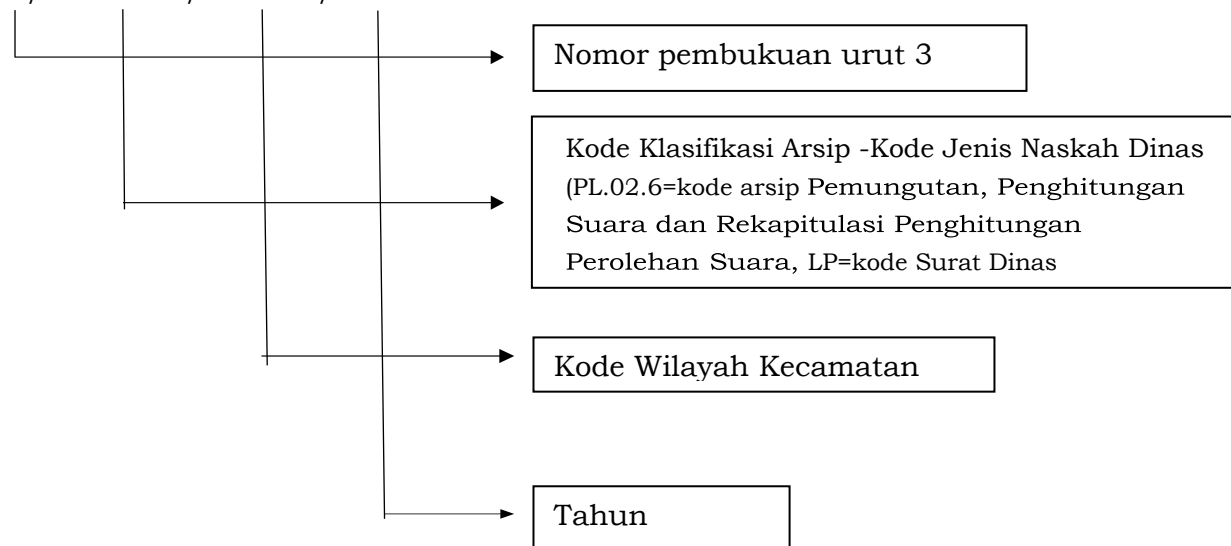
2/KU.03.2-SR/53.10.03.2006/2024



5. Laporan

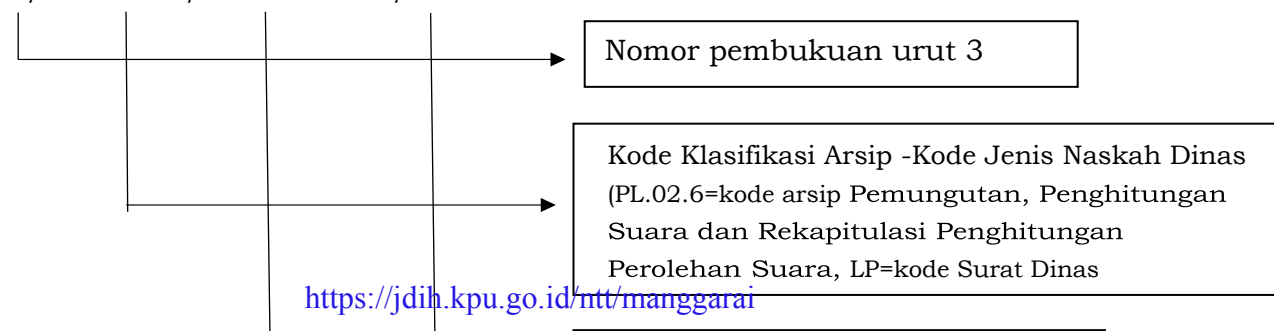
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretariat PPK Cibai:

3/PL.02.6-LP/53.10.06/2024



Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretariat PPS Wudi:

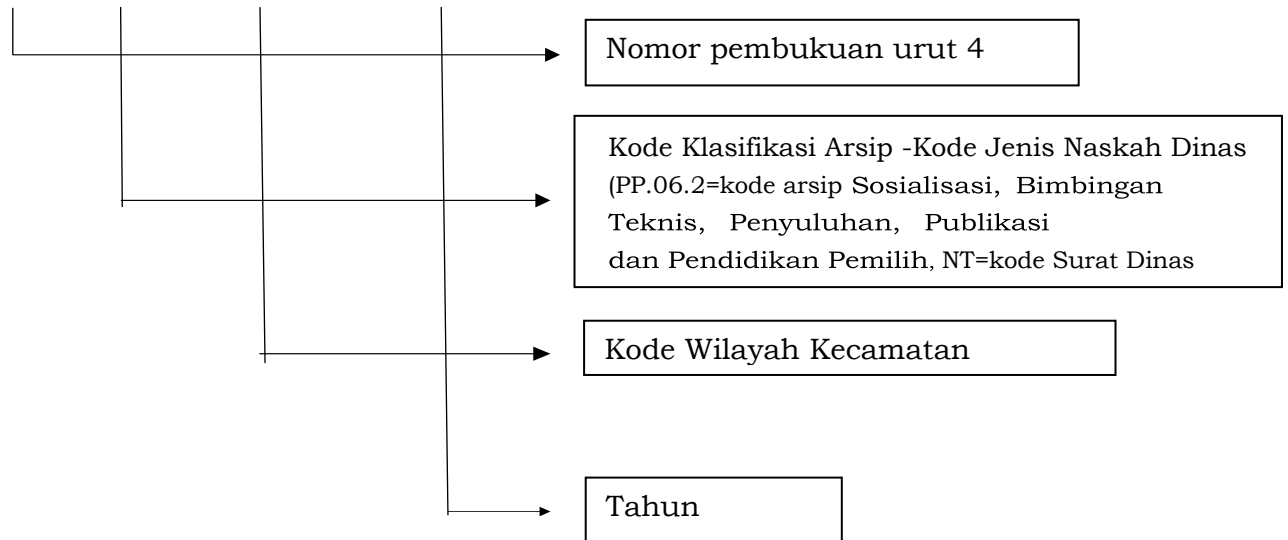
3/PL.02.6-LP/53.10.06.2006/2024



6. Notula

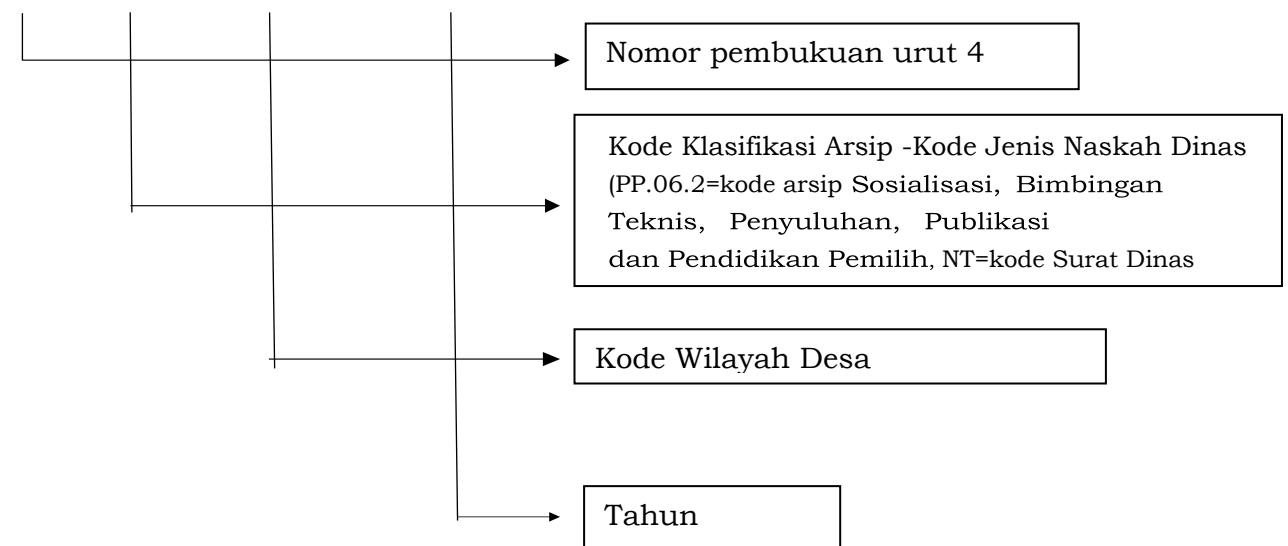
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretariat PPK Reok Barat:

4/PP.06.2-NT/53.10.16/2024



Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretariat PPS Nggalak:

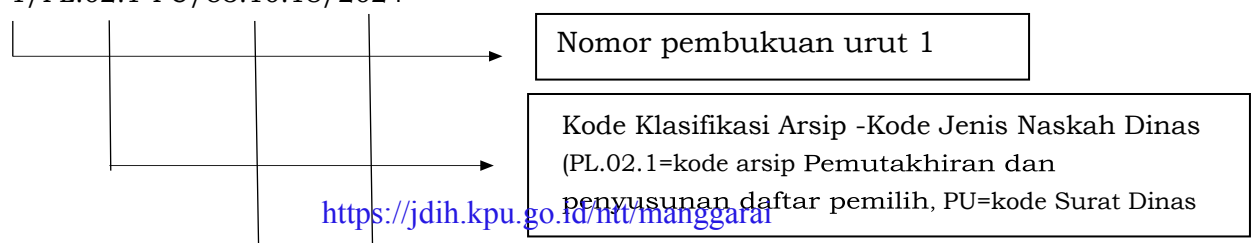
4/PP.06.2-NT/53.10.16.2005/2024



7. Pengumuman

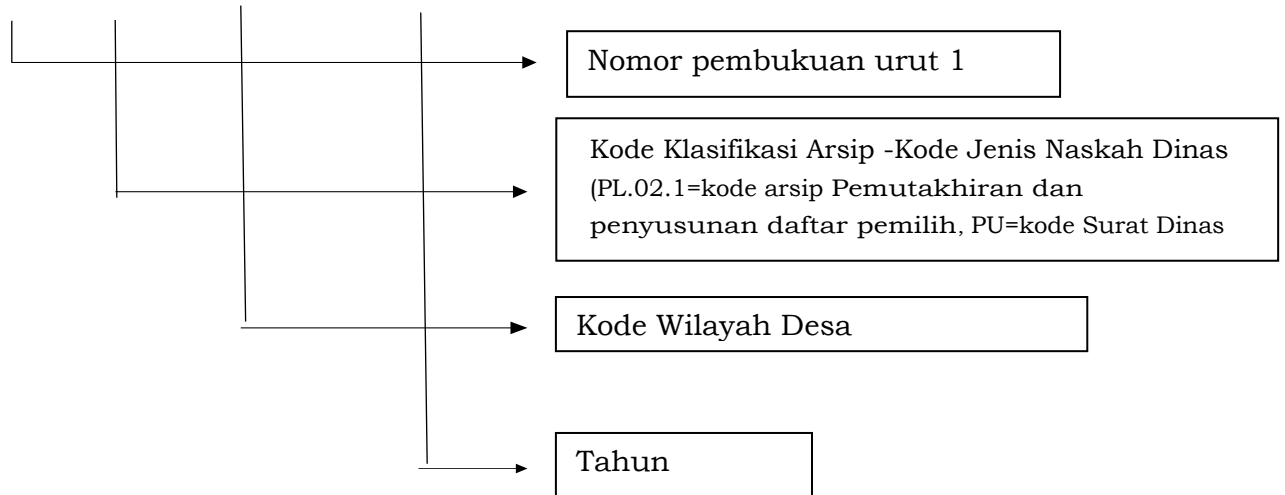
Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretariat PPK Satar Mese Utara:

1/PL.02.1-PU/53.10.18/2024



## Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua dan Sekretariat PPS Cireng

1/PL.02.1-ST/53.10.18.2009/2024



### F. Surat Dinas

Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara

#### 1. Susunan

a) kepala Surat Dinas terdiri dari:

- 1) kop Surat Dinas sesuai pejabat penanda tangan;
- 2) kata “Nomor”, “Sifat”, “Lampiran”, dan “Perihal”, diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas;
- 3) kata “Tempat dan Tanggal” pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
- 4) kata “Yang Terhormat” disingkat “Yth.”, ditulis di bawah “Perihal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirim surat;
- 5) alamat surat, ditulis di bawah kata “Yth.”.

b) Batang tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari Alinea Pembuka, Isi, dan Penutup.

c) Kaki

Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari:

- 1) Nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital,

dengan huruf awal kapital;

- 4) cap dinas;
- 5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima(jika ada).

## 2. Ketentuan lain

- a) kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama SuratDinas;
- b) jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya;
- c) perihal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca

## G. Logo dan Kop Naskah Dinas

### a) Logo PPK dan PPS

PPK, PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam pembuatan naskah dinas, menggunakan logo PPK, dan PPS dengan bentuk sebagai berikut:

logo PPK



Logo PPS



### b) Kop Naskah Dinas

Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh PPK, PPLN, dan PPS adalah sebagai berikut:

LOGO  
PPK/PPS

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA .....\*)

Keterangan:

- a) Logo PPK/PPS yang ditempatkan simetris.
- b) Tulisan “Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara\*)” dengan huruf kapital *tahoma* 12pt berwarna hitam, spasi 1,5.
- c) Tanda titik-titik diisi dengan wilayah kerja masing-masing PPK, atau PPS.  
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh sekretaris dan staf sekretariat PPK, dan PPS adalah sebagai berikut:

<b>SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/ PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.....</b>	
LOGO PPK/PPS	Alamat .....
Telepon: .....	Pos-El (Email): .....
<hr/>	
<b>Keterangan:</b>	
a) Logo PPK/PPS ditempatkan pada bagian tepi kiri kop naskah.	
b) Susunan tulisan simetris.	
c) Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm.	
d) Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 5,5 cm.	
e) Tulisan “Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara menggunakan huruf kapital <i>tahoma</i> 12 pt berwarna hitam, spasi 1,5.	
f) Tanda titik-titik diisi dengan wilayah kerja masing-masing sekretariat PPK, atau PPS.	
g) Tulisan “Alamat” dan Alamat Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara menggunakan huruf <i>tahoma</i> 12 pt warna hitam, spasi 1,5.	
h) Tulisan “Telepon” dan nomor telepon serta tulisan “Pos-el (Email)” kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*)” menggunakan huruf <i>tahoma</i> 11pt warna hitam.	
i) Kop Naskah Dinas dicetak dari komputer bersamaan dengan substansi naskah dinas.	

c) Ds

## H. Stempel Pemilihan

### a. Stempel Dinas

Stempel Dinas adalah tanda pengenal resmi yang digunakan sebagai tanda pengesahan naskah dinas PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS.

Stempel dinas, terdiri dari:

a) Stempel PPK dan PPS.

b) Stempel <https://id.kopnaskah.id/> PPK dan PPS.

b. Tata Cara Pemakaian Stempel Dinas

- b) Stempel Kesekretariatan PPK dan PPS untuk menyertai tanda tangan Sekretaris PPK dan PPS yang karena tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk menggunakan stempel Sekretariat PPK dan PPS dengan menggunakan tinta stempel warna biru atau ungu.
- c) Wewenang penyimpanan dan penggunaan stempel PPK dan PPS, serta stempel Sekretaris PPK dan PPS, dilaksanakan oleh masing masing Ketua dan Sekretaris PPK dan PPS.

c. Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Dinas

a) Panitia Pemilihan Kecamatan



Keterangan:

- a. garis tengah lingkaran luar: 37 mm;
- b. garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm;
- c. garis tengah lingkaran dalam: 25 mm;
- d. pada garis Tengah horizontal ditulis NAMA KECAMATAN;
- e. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan huruf kapital melingkar simetris; dan
- f. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.

b) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan



Keterangan:

- a. garis tengah lingkaran luar: 37 mm;
- b. garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm;
- c. garis tengah lingkaran dalam: 25 mm;
- d. pada garis Tengah horizontal ditulis "SEKRETARIAT";
- e. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dilanjutkan dengan nama Kecamatan

c) Panitia Pemungutan Suara



Keterangan:

- g. garis tengah lingkaran luar: 37 mm;
- h. garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm;
- i. garis tengah lingkaran dalam: 25 mm;
- j. pada garis Tengah horizontal ditulis NAMA DESA/KELURAHAN;
- k. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" dengan huruf kapital melingkar simetris; dan
- l. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.

d) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara



a.

Keterangan:

- g. garis tengah lingkaran luar: 37 mm;
- h. garis tengah lingkaran luar bagian dalam: 35 mm;
- i. garis tengah lingkaran dalam: 25 mm;
- j. pada garis Tengah horizontal ditulis "SEKRETARIAT";
- k. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN" dilanjutkan dengan nama desa/kelurahan dengan huruf kapital melingkar simetris; dan
- l. antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba